

PUBLIKA BUDAYA

Munir Tokoh Pejuang HAM Tahun 1988-2004

The Biography of Indonesia's Human Rights Figures in 1988-2004

Anis Kusmita Eka Wardani, Drs. Parwata, M.Hum, Mrs. Siti Sumardiati, M.Hum.

Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember

Email: Aniskew17@yahoo.co.id, 085655618389

Jln. Belitung 2 No. 9 Jember

Abstrak

Artikel ini disusun menggunakan data primer dan sekunder berisi tentang uraian mengenai riwayat hidup Munir Said Thalib selaku aktivis HAM di Indonesia. Cakupan pembahasan meliputi latar belakang, perjalanan hidup, respon Munir terhadap pemerintahan Orde Baru, peran Munir dalam kasus pelanggaran HAM, contohnya Marsinah dan kasus Tragedi Mei 1997-1998. Bagi masyarakat Indonesia khususnya para korban tindak kekerasan menganggap Munir ialah sosok atau tokoh pemberani yang tidak kenal lelah dalam perjuangan membela kaum tertindas dan pelanggaran HAM. Ia aktif di berbagai organisasi contohnya KontraS dan Imparsial. Perjuangan dan sikap yang selalu menentang kekerasan dan penindasan terutama pada masa Orde Baru seringkali membuat ia dan organisasinya harus mendapatkan ancaman-ancaman dan juga teror. Di tahun 2004 tepatnya 7 september 2004, ia tidak lagi mendapatkan ancaman melainkan telah dibunuh dengan racun arsenik di pesawat Garuda dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam. Kematianannya menimbulkan banyak spekulasi-spekulasi yang dibicarakan oleh kalangan sahabat sesama aktifis, pihak kepolisian ataupun pemerintah dan juga masyarakat luas. Ketidakwaajaran kematian Munir mendorong keluarga dan sahabat-sahabat Munir untuk mendesak pemerintah, sehingga pada akhirnya turut membantu dalam pengusutan kasus pembunuhan Munir dengan menetapkan TPF dalam kepress 111 tahun 2004.

Kata kunci: Tokoh HAM, Munir, kematian.

Abstract

This article was prepared using primary and secondary data contains a description of the life history of Munir Said Thalib as human rights activists in Indonesia. The scope of discussion are covered the background, biography, respons's Munir of the Orde Baru regime, Munir's role in human rights violations, for example Marsinah and case of May Tragedy 1997-1998. For Indonesian people, especially the victims of violence are considered Munir is a brave figure or figures tireless in the fight to defend the oppressed and human rights violations. He was active in various organizations, for the example Imparsial and KontraS. Struggles and his attitude was always against violence and oppression especially during the orde baru regime often make him and his organization should get threats and terror. In 2004, exactly 7 September 2004, he is no longer under threat but had been killed by arsenic poisoning in the Garuda flight from Jakarta to Amsterdam. His death sparked many speculations discussed by the friends of fellow activists, the police or the government and the wider people. Irregularities in the case of Munir's death encourage family and friends to urge the government which in turn helped in the investigation into Munir's murder by setting the TPF in kepress 111 of 2004.

Keyword: Human rights figures, Munir, death.

PUBLIKA BUDAYA

Pendahuluan

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto, sesaat dalam mata publik berada pada era yang penuh harapan. Sebab, tujuan utama rezim ini adalah mengedepankan kepentingan dan keberhasilan ekonomi dalam pemerintahan. Lahirnya Orde Baru mewarisi perekonomian pemerintah Orde Lama yang berada dalam kondisi krisis. Kondisi yang paling tampak adalah tingkat inflasi yang sangat tinggi, mencapai 732% antara tahun 1964-1965, pada tahun 1965-1966 mengalami penurunan, masih termasuk dalam kondisi parah yaitu 697%. (Arief Budiman, 1991: 48). Penurunan perekonomian yang terjadi membuat Soeharto mengambil paham pembangunan yang lebih berorientasi pada sistem perekonomian modern sebagai ideologi perekonomian bagi rezimnya. Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan ekonomi makro merupakan dua kata kunci yang menguasai wacana pembangunan Orde Baru.

Pengembangan perekonomian dijadikan alibi tersendiri untuk menjadikan rezim ini berkuasa selama 32 tahun di Indonesia dengan bergantung pada sistem negara dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, Dwi Fungsi ABRI digunakan untuk menekankan kehidupan konstitusional. Strategi pembangunan yang dijalankan oleh Orde Baru bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penambahan investasi baik disektor swasta maupun pemerintah.

Pembangunan dirancang dengan pola top down berupa industrialisasi, membuka peluang besar bagi masuknya investor-investor asing ke Indonesia. Sehingga pemerintah harus mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah yang ramah dan baik hati, agar para investor merasa nyaman. Stabilitas nasional yang mencakup stabilitas politik dan keamanan merupakan sebuah jaminan dari pemerintah kepada para investor, dengan menciptakan suasana bisnis yang baik.

Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang berat sebelah, artinya hanya berpihak kepada kepentingan-kepentingan investor dan pemerintah secara personal atau institusional, maka dirumuskan juga perencanaan masalah politik, karena pembangunan ekonomi tidak akan dapat

berjalan lancar apabila keadaan politik tidak stabil. Rancangan tersebut berupa kebijakan politik, sistem pemerintahan dengan struktur komando pusat, dan melibatkan pihak-pihak keamanan atas nama pembangunan dan stabilitas nasional. Konsekuensi dari masalah politik tersebut mengarah pada pemangkasan demokrasi yaitu dengan memperlihatkan adanya kecenderungan kekuasaan, kekerasan yang pada akhirnya menimbulkan kasus-kasus pelanggaran HAM. Pada hakikatnya hal ini yang justru menjadi awal munculnya gejolak dari golongan-golongan yang menjadi korban pelanggaran HAM yaitu masyarakat sipil.

Berbagai tindakan pelanggaran HAM yang berupa kekerasan hingga menghilangkan nyawa warga negaranya, baik secara massal maupun perseorangan tidak terlihat secara bebas dan transparan ke permukaan di bumi Indonesia. Karena selama Orde Baru berkuasa hal-hal yang berbau tuntutan terhadap HAM selalu dibungkam oleh rezim pemerintahan dengan berbagai alasan (demi stabilitas politik dan pembangunan). Adapun dua contoh kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini tidak di selesaikan dengan tuntas; kasus Marsinah dan kasus Tragedi Mei 1997-1998.

Masalah pelanggaran HAM tersebut tidak tiba-tiba muncul ke permukaan, melainkan lahir dari pantauan para aktivis yang memiliki kepedulian dan keprihatinan tinggi akan nasib sesama anak bangsa, yang ditindas secara sewenang-wenang oleh aparat pemerintah yang berkuasa tanpa melalui proses hukum. Salah satu aktivis yang mengabdikan diri pada perjuangan HAM dan memantau kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut hingga akhir hayatnya adalah Munir Said Thalib. Pria keturunan Arab lulusan Fakultas Hukum UNIBRA ini lahir di Malang, Jawa Timur pada 6 Desember 1965 dan merupakan seorang aktivis dan pejuang HAM Indonesia yang dihormati oleh para aktivis, LSM.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan yaitu: 1. Bagaimana riwayat hidup Munir Said Thalib? 2. Bagaimana respon Munir terhadap politik rezim Orde Baru? 3. Bagaimana peran Munir dalam advokasi kasus pelanggaran HAM (Marsinah 1993 dan Tragedi Mei 1997-1998)?

Dalam menulis karya ilmiah, perlu adanya metode untuk memperoleh suatu tulisan

PUBLIKA BUDAYA

yang diinginkan. Metode penelitian yang digunakan terkait erat dengan jenis penulisan yang dilakukan. Penelitian ini adalah kajian sejarah sehingga metode yang tepat untuk digunakan ialah metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis atas peristiwa di masa lampau (Louis Gottschalk, 1975: 32).

Metode ini terdiri dari pengumpulan sumber, (heuristik), kritik sumber, penafsiran sumber (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi). Artikel ini juga termasuk dalam wilayah sejarah kontemporer, sehingga metode sejarah lisan juga tidak bisa ditinggalkan. Penerapan sejarah lisan itu sendiri biasanya mencakup masalah pengaturan, persiapan dan pelaksanaan wawancara. Oleh karena itu, sejarawan masih perlu mencari sendiri informasi pelengkap dengan teknik wawancara yang baik agar diperoleh keterangan-keterangan lisan yang dapat dipertanggungjawabkan (Kuntowijaya, 1981:22).

1. Riwayat Hidup Munir

Munir adalah pria sederhana yang bersahaja, ia merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan Said Thalib dan Jamilah. Ia lahir dan dibesarkan di Batu Malang, Jawa Timur pada 6 Desember 1965 dan merupakan siswa dari Sekolah Dasar Muhammadiyah tahun 1976-1981, SMPN 1 Batu tahun 1981-1983, SMAN 1 Batu tahun 1983-1985. Munir merupakan anak dari keluarga pedagang bukan aktivis, sejak kecil Ayah Munir yang biasa dipanggil abah olehnya telah meninggal dunia sejak ia duduk di kelas 5. Ia melihat dan belajar pada ibunya bagaimana berjuang memimpin dan menghidupi 7 anak dengan berdagang. Setiap hari ia membantu berjualan di pasar, ia belajar bagaimana cara untuk berinteraksi, berhubungan ataupun menghargai orang lain. Ibunya seorang perempuan Arab tradisional yang hidup di sektor domestik, yang banyak menghabiskan waktu untuk anak. Dengan tingkat pendidikan yang terbatas, ibu Munir mempunyai interpretasi terhadap semua hal yang terjadi di luar rumah. Misalnya, kejengkelan dia atas penyerangan terhadap etnis cina di Jawa, termasuk di Malang pada tahun 1977 dsb. Pemikiran ibunya yang sederhana dan interpretasinya tentang etnisitas sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Munir sehingga ia ketika mengadvokasi tidak pernah

memandang suku ataupun agama yang diadvokasinya. Selain itu, sikap dari abahnya yang sederhana dan tidak mengagungkan kemewahan juga sangat berpengaruh dalam pemikiran Munir. Dari kecil ia telah dididik untuk tidak mengagumi kemewahan dan iapun menjadi aktivis yang sangat sederhana dan jauh dari kata mewah, ia selalu menggunakan motor bebeknya untuk berangkat ke kantor ataupun menghadiri pertemuan-pertemuan dengan rekan sesama aktivis.

Pengalaman yang ia dapat dari keluarga dan lingkungan tidak hanya di masa kecil, saat duduk di bangku SMP juga sangat berpengaruh. Pada masa itu ia sudah berhubungan dengan hukum, ia menemukan mayat perempuan, di sebuah bangunan kecil, sekitar 3x3 meter. Dalam bangunan tersebut terdapat satu kamar yang dihuni oleh keluarga pemilik penjual bangunan, bangunan tersebut tidak boleh dibongkar sebelum orang itu meninggal, demikian perjanjian dengan si pembeli. Setiap harinya Munir mengantarkan makanan dari ibunya untuk perempuan tersebut. Ia berdua dengan adiknya yang kelas lima SD melihat mayat perempuan dengan luka tusuk obeng. Sebagai anak kecil, ia terkejut dan lari untuk memberitahu warga sekitar. Semua warga datang, kemudian mengubur mayat orang tua tersebut. Setelah selesai pemakaman, ia pergi ke pasar dan menceritakan kejadian yang dialaminya ke kakak nomor dua yang pada waktu itu kelas satu SMA, kakak Munirpun marah: "*Kenapa kau nggak lapor polisi? kau biarkan pembunuhan itu terjadi?*" (Meicky Shoreamanis Panggabean, 2008:43) Saat itu Munir ketakutan karena ia masih duduk di bangku kelas 1 SMP, tetapi setelah mendengar kakaknya marah, ia berangkat ke kantor polisi dengan adiknya untuk melapor kasus pembunuhan tersebut. Kemudian kasus tersebut diusut pihak kepolisian dan keesokan hari pembunuhnya tertangkap.

Sikapnya yang berani, membuat ia tidak dapat membiarkan ada peristiwa pembunuhan dan menyetujui orang mengambil keputusan untuk mengubur. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa ia sudah kritis dan tegas dalam membuat pilihan yaitu pilihan memperjuangkan kebenaran. Walau kritis dan tegas, pada masa SMP juga ia merupakan siswa yang prestasinya tidak begitu menonjol, ia

PUBLIKA BUDAYA

mendapatkan ranking 180 dari 200 siswa dan nilai bahasa Inggrisnya 6 dibawah rata-rata. Ia memiliki kelebihan yaitu pintar berdiskusi dan aktif, tidak tahan untuk duduk diam belajar melainkan lebih suka bergerak dan bertindak. Ketertarikan Munir di bidang Humanitarianism ini juga sudah terlihat dari ia masih remaja terbukti setelah ia menyelesaikan sekolah lanjutan atas, ia melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Hukum UNIBRA, ia termasuk mahasiswa yang aktif dan kritis, semangatnya kuat untuk ikut beberapa gerakan mahasiswa yang ada dikampusnya dengan bergabung dan memimpin beberapa organisasi mahasiswa, diantaranya sebagai Ketua Senat mahasiswa Fakultas Hukum UNIBRA, Anggota Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir UNIBRA, Sekertaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Hukum UNIBRA, anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Sekretaris Al Irsyad cabang Malang, dan Koordinator wilayah IV Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia.

Dengan latar belakang pendidikan di bidang Hukum dan pengalaman-pengalaman berorganisasi menuntun ia untuk membela kaum yang tertindas dengan menjadi tenaga relawan dan penasehat hukum di LBH di Surabaya ataupun Malang.

2. Respon Munir Terhadap Pemerintah Orde Baru (Otoriter)

Munir merupakan mahasiswa yang cerdas, aktif dan juga kritis, pada tahun 1987 ia dipercaya menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dalam Periode 1978-1988 yang merupakan masa penerapan NKK-BKK. Ia juga mendapatkan penghargaan Pin Emas sebagai Lulusan UNIBRA yang sukses.

Ia merupakan aktivis HMI dengan mainstream pro-Soeharto (Konservatif), Ia militan (pro-militer) dan mengagumi Soeharto dalam arti kemapanan, bukan Soeharto sebagai pribadi. Ia tidak tahu bagaimana sistem politik Soeharto, tidak mengerti apapun tentang politik, yang ia tahu hanya Soeharto adalah pemimpin negara yang harus dipatuhi. Pada tahun 1980an ia pernah bersenjata membawa celurit ke kampus untuk berantem dengan anak-anak gerakan (aktivis), ia melawan anak-anak yang anti-Soeharto dan di akhir semester 5 pada tahun 1988-1989 ia mulai tertarik akan HAM sebagai isu politik dan HAM sebagai instrument

yang harus diperjuangkan yang diyakini, karena seringnya ia berdiskusi, debat dengan temannya yang seorang aktivis.

Perkembangan sistem politik di Indonesia jelas memperlihatkan adanya kecenderungan pergantian kekuasaan dengan kekerasan yang pada akhirnya muncul yaitu rezim otoritarian. Hal ini cukup jelas dilakukan oleh mereka yang berlatar militer atau elit politik militer untuk duduk di kursi kekuasaan, kekuasaan rezim ini disebut "Orde Baru". Selama kepemimpinan Orde Baru, Soeharto memperkenalkan "*ideologi pembangunan*" yang bergantung pada sistem negara dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Strategi pembangunan yang dijalankan oleh Orde Baru bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal, tetapi ternyata keberhasilan pembangunan tersebut tidak merata dan jauh dari kata berhasil. Kekuasaan di hegemoni oleh golongan-golongan tertentu, cara-cara mengelola negara yang tidak sehat ditandai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kekerasan serta banyaknya pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan adanya nilai-nilai kekuasaan yang telah memaksakan sebuah rezim secara sistematis (militarisme).

Kejahatan Orde Baru bukan hanya serangkaian kekerasan, pembunuhan, dan penghilangan nyawa yang sewenang-wenang karena pandangan politik yang dimiliki. Penggunaan sistem hukum untuk menjaga stabilitas pemerintahan rezim, penciptaan strategi kebudayaan Orde Baru, seperti penggunaan asas tunggal Pancasila, penghancuran mekanisme hukum adat dengan pengaturan mengenai pemerintahan desa, juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari praktik kejahatan negara di masa lalu. Persoalan ini sudah menjadi semacam sistem yang dianggap absah oleh mekanisme hukum dan politik, akibat pilihan-pilihan strategi pembangunan, disini Militer sebagai agen pembangunan dan stabilitas memiliki dasar bertindak. Praktik penghilangan orang pada penghujung kekuasaan Soeharto menyadarkan kita betapa pengendalian peran politik rakyat adalah kemutlakan kekuasaan sehingga segala kritikan yang ada telah mengantarkan ratusan orang masuk penjara, dianiaya, dan bahkan terbunuh secara misterius, institusi dan peran dalam

PUBLIKA BUDAYA

kelembagaan militer mencerminkan bagaimana militer merupakan alat efektif bagi pengendalian dan penguasaan.

Kejadian-kejadian tersebut memberikan pengaruh pada pemikiran serta sikap Munir sehingga mendorong ia bersama rekan-rekannya merespon dengan bentuk perjuangan melawan ketidakadilan HAM dengan melakukan advokasi dan investigasi pada kasus-kasus HAM. Ia mewujudkan keseriusannya dalam bidang hukum dengan cara melakukan pembelaan-pembelaan terhadap sejumlah kasus, terutama pembelaannya terhadap kaum tertindas (Marsinah 1993 dan Tragedi Mei 1997-1998). Ia terus menyuarakan kebenaran dan keadilan agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran HAM terjadi di Indonesia dan bagi masyarakat luas di Jawa Timur Munir lebih dikenal sebagai pejuang buruh, hal itu ia lakukan sejak masih mahasiswa (bergabung sebagai relawan di LBH Surabaya). (Willy Pramudya, 2004: 6)

Banyaknya korban kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan aparat militer di rezim Orde Baru membuatnya terjun ke masyarakat dan mendedikasikan hidupnya untuk bergabung ke lembaga-lembaga hukum.

Dengan semangat dan keberanian yang ia miliki mendorong ia bergabung dengan berbagai organisasi, ia menjadi tenaga relawan di LBH Surabaya, dua tahun kemudian ia terpilih menjadi ketua LBH Pos Malang yang menjadi wahana penting bagi Munir untuk terus mengasah kepedulian dan keberpihakkannya dalam melawan kesewenangan-wenangan dan ketidakadilan, disini kompetensi, kepekaan emosionalitas, dan keberpihakkannya terbentuk demi bekerja untuk bersama orang yang dizalimi kekuasaan. Tahun 1995 Munir menjadi Direktur LBH Semarang selama 3 bulan, kemudian pindah ke Jakarta bekerja di YLBHI dari tahun 1996-2001 dan pada tahun 1996 ia mendirikan Koordinator KIPP HAM, KIPP HAM adalah jaringan dari berbagai LSM dan organisasi massa yang bertujuan untuk memonitor dan advokasi kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh negara, pada Maret 1998 KIPP HAM dirubah menjadi KontraS.

3. Peran Munir Dalam Advokasi Kasus Pelanggaran HAM

1. Advokasi Kasus Marsinah 1993

Pada awal 1990an, gerakan perburuhan terus tumbuh dan banyak lembaga baru yang giat dalam bidang ini. Salah satunya ialah Yayasan Arek yang dikelola oleh aktivis-aktivis mahasiswa idealis, Arief W. Jati merupakan aktivis sekaligus pemikir dari yayasan yang aktif di bidang perburuhan. Dia mengajak Munir untuk membongkar kasus pembunuhan Marsinah karena dinilai kematian Marsinah tidak wajar. Pada saat itu Munir merupakan aktivis buruh yang giat mengkampanyekan perubahan kebijakan buruh dalam 3 hal, yaitu kebebasan berserikat, perbaikan upah, dan penarikan militer dalam konflik perburuhan. Satu bulan setelah mayat Marsinah ditemukan, Arif W. Jati menghubungi Munir beserta aktivis dari Bandung, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya untuk bertemu dan nyekar di makam Marsinah. Setelah pemberitaan tentang kasus pembunuhan Marsinah tidak pernah berhenti di surat kabar lokal, diadakannya rapat di kantor Yayasan Arek, saat itu Munir menyanggupi akan melakukan investigasi atas pembunuhan Marsinah. (Jaleswari Pramodhawardani dan Andi Widjajanto ed. 2004: 169).

Bentuk investigasi awal yang dilakukan Munir adalah dengan datang ke YLBHI dan berbicara kepada Hendarji dan Mulyana W. Kusumah untuk memfasilitasi dan membentuk tim investigasi. Tim ini mencoba memahami teori pembunuhan Marsinah dalam konteks perburuhan Nasional, dengan hasil bahwa kematian Marsinah mengarah ke peristiwa di kantor KODIM dan konsekuensi dari kekerasan politik perburuhan.

Berita kematian Marsinah terus mendapat perhatian masyarakat pers dan juga LSM, sekitar 27 LSM dari Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Salatiga, Semarang dan Bandung membentuk Komisi Aksi Solidaritas Untuk Marsinah (KASUM) dengan koordinator lapangan Arief W. Jati dari Yayasan Arek. Berbagai investigasi terus dilakukan Munir dan anggota Komisi Aksi Solidaritas Untuk Marsinah (KASUM), salah satunya adalah dengan aksi kampanye. Aksi kampanye berupa dengar pendapat dengan fraksi ABRI, DPR RI yang mengatasmakan solidaritas buruh antara lain mengharapkan ABRI tidak ikut campur dan menghentikan kampanye ini.

Kematian Marsinah bukanlah kasus kriminal biasa, dia ditemukan sudah tidak

PUBLIKA BUDAYA

bernyawa pada 9 Mei 1993 dan tergeletak dalam posisi terlentang, hampir sekujur tubuhnya penuh dengan luka memar bekas pukulan benda keras, kedua pergelangan tangannya lecet, di duga akibat diseret dalam tangan terikat. Tulang panggulnya hancur karena pukulan benda keras berkali-kali, di sela-sela pahanya ada bercak-bercak darah. Ia ditemukan setelah beberapa hari sebelumnya tanggal 3-4 Mei 1993 melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan upah Rp.1.700 menjadi Rp. 2.250 di PT. Citra Putra Surya (CPS). Ia merupakan salah satu penggerak unjuk rasa, ia mencegah teman-temannya bekerja dan mengajukan 12 tuntutan mengenai kenaikan gaji dan tunjangan, pada hari yang sama pihak Koramil setempat turun tangan mencegah aksi buruh. Pasca pemogokan, beberapa buruh yang dianggap sebagai penggerak atau provokator diamankan pihak keamanan setempat untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang berperan aktif dalam gerakan tersebut. Ada 10 nama buruh yang diberikan pihak perusahaan kepada Mupika Porong, kesepuluh buruh itu berjenis kelamin laki-laki. Diantara sepuluh buruh tersebut adalah Yudi Prakoso, yang menjadi bekal petugas Koramil setempat untuk menjaring buruh-buruh lain yang terlibat. Keesokan harinya, pada tanggal 5 Mei 1993, 13 buruh yang mendapat surat panggilan ke KODIM, dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri dengan alasan tidak dibutuhkan lagi diperusahaan.

Setelah mendengar 13 kawannya mendapat PHK, Marsinah tidak diam saja ia mendatangi KODIM pada malam hari untuk mempertanyakan teman-temannya. Setelah itu keberadaan Marsinah tidak diketahui lagi, hingga ditemukan pada 9 Mei 1993 di sebuah gubuk dekat hutan Wilangan Nganjuk dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Adapun spekulasi-spekulasi yang diungkapkan Arief W. Jati dan aktivis-aktivis lainnya tentang kematian Marsinah yang dianggap mengancam kepentingan pihak tertentu, sehingga dibunuh untuk mengamankan kepentingan tersebut.

Pada tanggal 30 September 1993 dibentuk Tim Terpadu Bakorstanasda Jatim, tugas tim ini untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah dengan penanggung jawa Kapolda Jatim, Satgas Kadit Reserse Polda Jatim yang beranggotakan penyidik-penyidik Polda Jatim serta Komandan

Intel. Kerja dari tim diawali dengan penangkapan pemilik dan staf PT. Citra Putra Surya (CPS) secara diam-diam di kediamannya jalan Puspita Surabaya, Yudi Astono ditangkap di kediamannya di kompleks perumahan Delta Sari Indah, sedangkan tujuh karyawan lainnya ditangkap di pabrik. Penangkapan dan penahanan yang secara mendadak dan tidak ada pemberitahuan kepada keluarga, 18 hari kemudian diketahui bahwa staf dan pemilik PT. Citra Putra Surya (CPS) sudah ditahan dengan tuduhan pembunuhan Marsinah.

Mengetahui hal tersebut Komisi Aksi Solidaritas Untuk Marsinah (KASUM) melakukan investigasi akan kejanggalan yang dilakukan pihak KODIM terhadap tersangka yang ditahan dalam kasus pembunuhan Marsinah, mereka meragukan bahwa para tahanan yang terdiri dari pemilik perusahaan dan staf-stafnya merupakan pelakunya. Tim investigasi telah sepakat untuk membantu Advokat Trimulja D. Soerjadi membela para tahanan. Data hasil investigasi telah diberikan untuk dijadikan bahan pembelaan para tersangka palsu tersebut. Pada persidangan terdakwa Suprpto dan Suwono, tim advokasi menghadirkan Mutiari sebagai saksi agar dapat meringankan terdakwa dalam persidangan. Mutiari menyangkal bahwa pada 5 Mei 1993 ada rapat yang membahas rencana dan pembagian tugas untuk membunuh Marsinah, sedangkan pada 7 Mei 1993 memang ada rapat, akan tetapi tidak membicarakan rencana pembunuhan Marsinah seperti yang didakwakan Jaksa. Tidak hanya Mutiari, Riyanto, Astuti Ningsih, Lilik Indarsih (Karyawan PT. CPS Porong), mereka bersaksi bahwa tidak ada rapat yang terjadi di ruang kerja Yudi Astono pada 5 Mei 1993. Adapun kesaksian Susianawati dan Lasmini, pembantu rumah tangga Yudi Susanto, mereka berdua mengakui bahwa Bambang Wuryantoro, Widayat, dan AS Prayogi merupakan orang yang menggotong seorang wanita ke dalam kamar pembantu di rumah majikannya tersebut.

Saksi yang memberatkan ketiga terdakwa tersebut selanjutnya adalah Kapten Kusaeri yang mengaku ikut mobil yang dikemudikan Widayat pada 5 Mei 1993 sekitar pukul 21.00 WIB. Menurut kesaksiannya, di dalam mobil itu selain ada Widayat juga ada Bambang, Prayogi dan Suwono. Kesaksian

PUBLIKA BUDAYA

ketiga saksi berbeda dengan yang dipaparkan oleh para terdakwa (ditambah 6 terdakwa lainnya), akan tetapi Jaksa tidak mempertimbangkannya, akhirnya ketiga terdakwa tetap divonis 12 tahun penjara.

Tim advokasi terus melakukan upaya, Munir bersama rekan-rekannya masih tetap memperjuangkan dengan terus melakukan investigasi. Selama investigasi berlangsung terdapat adanya kejanggalan yang dikemukakan oleh dr. Mun'im Idries selaku pakar forensik dari Instalasi Kedokteran Kehakiman (IKK) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. dr. Mun'im menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap Marsinah adalah akibat luka tembak. Terdapat kejanggalan dalam pembuatan visum et repertum (VR) yang dibuat oleh pihak RSUD Nganjuk karena terlalu sederhana hanya 1 halaman saja, visum et repertum (VR) yang dibuat dr. Yekti Wibowo dari RSUD Nganjuk tidak memenuhi standar pemeriksaan jenazah korban pembunuhan. Visum yang baik harus mencantumkan identitas korban, prakiraan saat kematian serta sebab dan cara kematian, terkait ketidaksesuaian visum et repertum (VR) dengan barang bukti. Barang bukti balok yang diduga digunakan untuk menyodok alat kelamin Marsinah, menurut dr. Mun'im tidak sesuai dengan luka pada korban.

Balok yang ditunjukkan dipersidangan tersebut terlalu besar karena ketika memeriksa mayat Marsinah, genitalnya hanya ada satu luka saja dan dibagian dalamnya luka hanya 3 cm. Satu luka yang terdapat pada alat kelamin Marsinah juga tidak sesuai dengan jumlah pelaku yang melakukannya, dalam persidangan menyebutkan ada tiga pelaku yang melakukannya dalam waktu yang berbeda. Jika pelakunya berjumlah tiga orang, dan lukanya hanya satu, bisa saja menjadi mungkin apabila alat yang dipakai menusuk tidak dicabut. Pakaian yang dikenakan Marsinah ketika ditemukan telah dibakar oleh petugas RSUD Nganjuk sebelum diperiksa laboratorium forensik, padahal identifikasi korban pembunuhan harus lengkap, termasuk aksesoris yang dikenakan.

Dengan adanya beberapa bukti dan kejanggalan yang diungkapkan dr. Mu'nim dan kesaksian-kesaksian para terdakwa yang disiksa, tim advokasi terus melakukan upaya persidangan sehingga para terdakwa yang

dipaksa mengaku membunuh Marsinah dapat bebas. Setelah mereka bebas tim pencari fakta melakukan penyelidikan, setidaknya ada 27 orang yang bertanggung jawab terhadap proses skenario setelah Marsinah meninggal.

Selama kasus ini berlangsung Munir pernah diancam dijadikan sosis panggang oleh pihak KODIM, tetapi ia dan teman-temannya dalam KASUM tetap melakukan advokasi dan investigasi kasus pembunuhan Marsinah. Ia juga berusaha menghentikan intervensi militer dalam penyelesaian perselisihan buruh.

2. Advokasi Tragedi Mei 1997-1998

Detik-detik jatuhnya rezim Soeharto antara 1997-1998, banyak demonstrasi besar-besaran terjadi di Indonesia. Berawal dari berlangsungnya pemilu yang dimenangkan oleh partai Golkar dengan memenangi lebih dari 70 % kursi DPR RI pada 28 Mei 1997 dan pada 1-11 Maret 1998 berlangsung sidang umum MPR RI dan hasilnya kembali mengukuhkan Soeharto sebagai presiden RI dan didampingi oleh BJ Habibie sebagai wakil presiden. Hal tersebut mendorong banyak aktivis, pemuda dan seniman di berbagai daerah melakukan unjuk rasa, unjuk rasa tersebut merupakan rangkaian kerusuhan yang terjadi di bulan Mei 1997-1998.

Dalam rangkaian kerusuhan tersebut ada kasus penculikan dan penghilangan paksa terhadap 24 orang penduduk sipil, yang terdiri dari; Pius Lustrilanang, Desmon J Mahesa, Haryanto Taslam, Mugiyanto, Aan Rusdianto, Faisol Reza, Andi Arief, Rahardja W Jati, Nezar Patria, Suyat, Yani Afri, Sonny, M. Yusuf, Noval Alkatiri, Dedy Hamdun, Ismail, Bimo Petrus, Abdun Naser, Hendra Hambali, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin dan Wiji Thukul. Dari 24 korban penculikan ada 9 korban yang telah di lepaskan, antara lain: Andi Arief, Faisol Reza, Haryanto Taslam, Desmon J Mahesa, Mugiyanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria, Pius Lustrilanang dan Rahardja W Jati.

Pada masa kerusuhan tersebut Munir menjabat sebagai ketua Dewan KontraS, ia melakukan investigasi dan pemantauan orang-orang hilang yang diculik. Pada tanggal 30 juni 1998 KontraS menggelar siaran pers, dalam siaran persnya Munir mendesak agar kasus penculikan ini dibuka di meja persidangan. Desakan tersebut ditanggapi oleh Jendral TNI Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 3 Agustus 1998. Tim ini

PUBLIKA BUDAYA

diketahui oleh Jenderal TNI Subagyo HS selaku KSAD, kemudian wakil ketua terdiri dari Letjen TNI Fachrul Razi dan Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam). Kemudian anggota terdiri dari Letjen TNI Soesilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhanas), Letjen TNI Djamiri Chaniago (Pangkostrad) dan Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri). Hasil sidang DKP memberhentikan Letjen TNI Prabowo Subianto dari dinas aktif militer dan memberhentikan Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono dari jabatannya sebagai Danjen Kopassus, Kolonel Chaerawan semua dibebaskan dari tugas dan jabatan struktural di ABRI.

Penyelidikan DKP dilakukan secara tertutup, dan sampai dengan saat ini dokumen-dokumen DKP tidak dapat diakses pihak manapun, termasuk korban dan keluarga korban sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus ini. Dalam rangka menindaklanjuti salah satu keputusan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, dilakukan penyelidikan oleh Puspom ABRI, selanjutnya diketahui ada 11 anggota Tim Mawar yang dibentuk oleh Kopassus Mayor Bambang Kristiono terlibat dalam kasus penculikan. Sebagian dari mereka dipecat dan dihukum penjara 12 hingga 22 bulan, sedangkan Mayor Bambang Kristono dihukum 22 bulan dan dipecat dari ABRI oleh Mahkamah Militer.

Usaha Munir tidak sampai disitu, pada tanggal 4 februari 1999 ia bersama keluarga korban menggelar siaran pers untuk merespon pengadilan militer terhadap kasus penculikan dan penghilangan paksa, proses peradilan terhadap 11 anggota Kopassus itu semakin kabur serta tidak mungkin bisa mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya, oleh sebab itu perlu dilanjutkan dan ke 11 terdakwa dibebaskan saja karena mereka sesungguhnya hanya melaksanakan perintah atasan, bukan pengambil keputusan. Oleh karena itu yang patut dihadapkan kemuka sidang Mahmil tersebut adalah Letjen Prabowo Subianto beserta kedua anak buahnya yakni Mayjen Muchdi PR dan Kol. Chairawan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas operasi penculikan para aktivis tersebut.

Satu tahun kemudian, 6 April 1999 digelar Mahkamah Militer, dengan terdakwa 11

orang anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar. Para terdakwa hanya dituntut dengan kejahatan perampasan kemerdekaan secara bersama-sama. Tanpa sepengetahuan keluarga korban, keputusan Mahkamah Militer pada tingkat banding menghilangkan sanksi hukum berupa pemecatan dari dinas kemiliteran kepada tujuh orang anggota tim mawar lainnya. Sementara itu, 4 terpidana lainnya mendapatkan promosi kenaikan jenjang karir dalam dinas kemiliteran. Terlepas dari hasil sidang Munir tetaplah pejuang HAM yang telah mampu menggoyahkan institusi tentara yang begitu kokoh pada era Orde Baru, ia telah membebaskan sejumlah orang yang sempat diculik dan direnggut hak-haknya oleh negara dengan penegakkan yang ia lakukan, pengabdianya terhadap kasus Humaniter sangatlah patut dicontoh untuk menuju Indonesia yang lebih baik.

Keseriusannya dalam bidang hukum ini mendorong ia untuk mengembangkan pengetahuannya tentang dunia HAM secara lebih ketat karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan pria berdarah arab ini untuk penegakkan HAM di Indonesia, sambil berjuang ia pun memutuskan kuliah S-2 dengan memperdalam ilmu hukum di bidang HAM internasional dan implikasi-implikasi konflik bersenjata terhadap konsolidasi demokrasi dan kebebasan individual di Universitas Utrecht.

Ia berangkat pada 6 September 2004 malam, diantar oleh istri tercinta Suciwati serta rekan-rekan IMPARSIAL dan KontraS, ia dan Suciwati sempat makan minum di Dunkin Donut's selama menunggu keberangkatan dan akhirnya mereka berpisah ketika harus segera boarding. Pada hari Selasa pukul 00.40 waktu setempat, pesawat transit di Singapura selama satu jam sepuluh menit, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Amsterdam pada pukul 01.50 waktu setempat dan dijadwalkan tiba di Amsterdam 7 September 2004, pukul 08.10 waktu Amsterdam. Dalam perjalanan dari Singapura menuju Amsterdam Munir duduk di kelas ekonomi kursi 40G dan sekitar 40 menit setelah take off Munir terlihat menuju toilet, sekitar dua jam kemudian ia mendatangi pramugara Bondan Hernawa dan menyampaikan bahwa ia sakit dan ingin dipertemukan dengan dr. Tarmizi yang duduk di kelas bisnis sambil menyerahkan kartu nama

PUBLIKA BUDAYA

dokter itu. Setelah bertemu dengan dr. Tarmizi, Munir menyampaikan bahwa ia telah muntah dan buang air besar sebanyak 6 kali, kemudian ia mendapat penanganan oleh dr. Tarmizi dan ditempatkan di kursi nomor 4 kelas bisnis agar dekat dengan dokter. Sepanjang perjalanan Munir terus mengalami muntah dan buang air besar berkali-kali sekalipun sebelumnya telah diberikan obat diare dan susu serta air garam.

Dr. Tarmizi kemudian memberikan suntikan dan Munir kembali tenang. Hal ini tidak berlangsung lama ia masih sering ke toilet sehingga meminta tidur di lantai dekat wc agar dekat dan bisa cepat kalau mau muntah. Pukul 06.00 Pramugari mencoba membangunkan Munir untuk menanyakan kondisinya, tetapi tidak ada respon, sehingga pramugari memberitahu dr. Tarmizi untuk memastikan keadaan Munir, dan akhirnya dipastikan telah meninggal dunia pada usia 38 tahun. Setelah dinyatakan meninggal pada 7 September 2004, dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam, beberapa stasiun televisi menayangkan berita duka tersebut. Hal ini membuat banyak masyarakat Indonesia kaget dan tidak menyangka terutama untuk keluarga, kerabat dan sahabat-sahabatnya.

Dua bulan kemudian, tepatnya pada 10 November, harian sore Belanda NRC Handelsblad adalah media pertama yang memberitakan adanya temuan racun arsenik di tubuh Munir. Esoknya harian pagi Trouw dan De Volkskrant mengembangkan berita yang sama. Istri Munir, Suciwati mendapat kabar itu justru dari rekan-rekan Munir di Belanda. Setelah mengetahui bahwa adanya sebab tak wajar dalam kematian Munir, Suciwati meminta pemerintah khususnya pihak kepolisian menjelaskan lebih lengkap hasil otopsi tersebut. Suciwati juga menuntut agar ketidakwajaran ini diusut sampai tuntas.

Pembunuhan Munir merupakan peringatan bagi para pembela HAM di Indonesia bahwa pekerjaan mereka membuat mereka rawan ancaman dan impunitas berlangsung bagi mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan penghilangan paksa atas para pembela HAM. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional dan nasional untuk menjamin semua orang yang

diduga melakukan pelanggaran HAM dibawa ke hadapan hukum dalam peradilan yang memenuhi standar keadilan internasional.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, Munir selaku aktivis HAM di Indonesia menanggapi kejahatan dan kekerasan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru dengan cara menyuarakan nasib kaum buruh, aktivis, mahasiswa dan pemuda, serta masyarakat yang mengalami penindasan serta pelanggaran HAM. Di Indonesia, sistem politik otoritarian dan militeristik pada masa Orde Baru mendorong pelanggaran HAM terjadi, berbagai kasus pelanggaran HAM tidak di koreksi dengan alasan demi menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Serangkaian kekerasan, pembunuhan, penculikan mendorong Munir melakukan pemantauan dan advokasi. Ia mengadvokasi kasus pelanggaran HAM yang tergolong berat, seperti Marsinah dan Tragedi Mei 1997-1998 yang sampai saat ini belum ditangkap pelakunya atau disebut juga *Dark Case* (kasus gelap). Ia berusaha mengungkap dalang atau pelaku kejahatan pelanggaran HAM yang diduga ada keterkaitan dengan pihak militer. Kedua kasus yang ditangani Munir ini seharusnya diikuti penataan kembali sistem politik khususnya meletakkan posisi militer dalam kontrol kekuatan politik sipil yaitu dengan membatasi peran militer dan membangun kepatuhan terhadap sistem politik yang menempatkan militer semata-mata dibawah supremasi sipil.

Peran Munir dalam kasus Marsinah dan Tragedi Mei 1998 selain untuk mengadvokasi dan melakukan investigasi, ia juga berusaha menghentikan intervensi militer dalam kasus pelanggaran HAM. Dalam masa perjuangannya tersebut ia menjadi korban penindasan HAM, ia meninggal dibunuh diatas pesawat Garuda.

Kematian Munir sangat disayangkan karena ia merupakan salah satu dari banyaknya orang yang masih peduli dan mau membantu kaum tertindas. Munir menghidupkan harapan banyak orang tentang keadilan serta menjadi seorang yang memberikan pencerahan untuk orang-orang yang buta hukum menjadi sadar dan mau berjuang menegakkan hak-haknya dan membuka mata masyarakat tentang perlunya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

PUBLIKA BUDAYA

Asas imparial atau ketidak berpihakan Munir, mampu membawanya sebagai orang yang pada satu sisi memperjuangkan kalangan yang terlanggar hak asasinya oleh pihak militer, namun pada saat bersamaan juga mau mendampingi anggota keluarga militer yang membutuhkan bantuan hukum. Konsistensi dan keberaniannya dapat menginspirasi banyak orang untuk berani menghadapi segala kejahatan terhadap kemanusiaan dan keadilan. Ia mewariskan kepada bangsa Indonesia sesuatu yang berharga yaitu keberanian dan karakter manusiawi untuk memperjuangkan hal-hal yang baik.

Daftar Pustaka

- Jaleswari Pramodhawardani dan Andi Widjajanto (ed.), *Munir: Sebuah Kitab Melawan Lupa*. Bandung: Mizan, 2004.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995.
- Kumpulan naskah tulisan Munir, *Membangun Bangsa dan Menolak Militerisme, Jejak Pemikiran Munir 1965-2004*. Jakarta Pusat: Kasum, 2006
- Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah* (Terj.) Nograho Notosusanto, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
- Melly G. Tan. "Masalah Perencanaan Penelitian," dalam Koentjraningrat, *Metode-Metode Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- M. Yuanda Zara, *Kematian Misterius Para Pembaru Bangsa*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007.
- Sivfian Hendra Legowo, "*Dinamika Politik Rezim Orde Baru (ORBA) di Indonesia Tahun 1990-1996*", Jember: Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 2013.
- Tim Kontras, *Bunuh Munir! Sebuah Buku Putih*. Jakarta: KontraS, 2006.
- Tim Imparsial, *Tembok Tebal Pengusutan Pembunuhan Munir*, Jakarta: Imparsial, 2006.
- Willy Pramudya ed, *Cak Munir Engkau Tak Pernah Pergi*. Jakarta, gagasan media, 2004.
- Sumber Surat Kabar dan Internet**
- Ahmadi, "Teka-teki arsenik di tubuh Munir", dalam *Pilars*, No.46, 22-28 November 2004.
- Amnesty Internasional, "Surat Terbuka Kepada Jaksa Agung Indonesia pada Peringatan 7 tahun Pembunuhan Munir", Jakarta, 6 september 2011.
- Keppres No.111/2004 tentang Pembentukan Tim Pencarian Fakta Kasus meninggalnya Munir, yang telah ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2014.
- Tria Amelia Agustin, "Saat-saat terakhir Munir" dalam *Pilars*, No.46, 22-28 November 2004.
- Dirangkum "wawancara dengan Pollycarpus, kru Garuda, Drupadi Dillon, dan Dr. Tarmizi Hakim "Saat Terakhir Munir" dalam *Tempo*, 5 Desember 2004.
- Wawancara Suciwati, kantor KontraS di Surabaya, 28 Februari 2012.

